



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



2021 | LAPORAN KINERJA (LKj)



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK selama Tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja, serta memuat analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Pusat Diklat SDM LHK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik di unit pusat maupun di unit daerah dan menjadi bagian dalam mewujudkan pencapaian peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai tujuan penyusunannya.

Bogor, Januari 2022
Plh. Kepala Pusat,



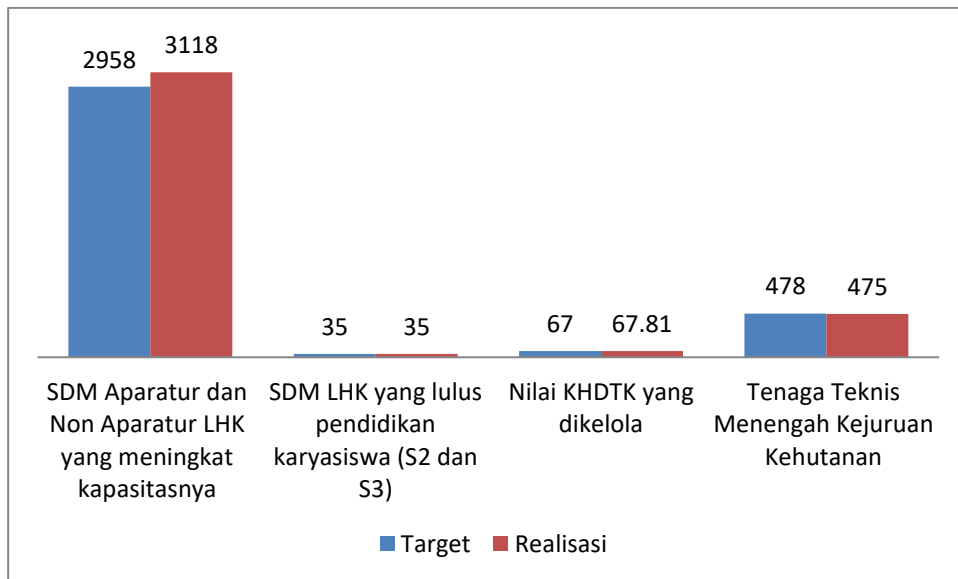
Puji Iswari, S.Hut., M.Si
NIP. 19690625 199803 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengacu pada Peraturan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2015 – 2019 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK. 187/DIK/PU/OTL.2/10/2017 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka pada Tahun 2021 ditetapkan rencana kinerja dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM LHK. Disamping itu Pusat Diklat SDM LHK juga menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, SDM LHK yang lulus pendidikan karyawan (S2 dan S3), nilai KHDTK yang dikelola dan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia, Realisasi keuangan satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 sebesar Rp.32.867.853.878,- atau sebesar 96,39%, dengan realisasi fisik rata – rata sebesar 101,49%, sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 untuk kegiatan indikator kinerja pada SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebesar 105,41%, SDM LHK yang lulus pendidikan karyawan (S2 dan S3) sebesar 100%, Nilai KHDTK yang dikelola sebesar 101,21%, dan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan 99,37% sehingga masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan. Grafik Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK tahun 2021 sebagai berikut:



Pada Tahun 2021 capaian kinerja peningkatan kapasitas SDM LHK telah melebihi target karena pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dengan *Learning Management System* (LMS) di Pusdiklat SDM LHK telah berjalan lebih stabil dibandingkan tahun 2020 sehingga penggunaannya dapat dioptimalkan dan pelaksanaan diklat berjalan lancar. Ketersediaan sarana dan prasarana diklat serta anggaran yang cukup memadai dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh baik full maupun blended learning. Selain itu, telah mulai terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia baik widyaiswara, pengelola dan penyelenggara pelatihan terutama ketersediaan Admin dan Sub Admin yang sudah cukup merata di Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK-BDKLHK pelaksana pelatihan jarak jauh.

Akan tetapi tidak tercapainya target jumlah IKK untuk kegiatan SDM LHK adalah Tenaga Teknis Kehutanan Menengah yang mana jumlah lulusan tahun 2021 hanya 475 orang dari target IKK sebanyak 478 orang. Hal ini dikarenakan sebanyak 3 siswa tidak memenuhi nilai standar minimal kelulusan dari SMKK Pekanbaru, sehingga pencapaian target IKK tidak dapat tercapai. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SINGKATAN-SINGKATAN.....	x
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Pengertian	2
D. Manfaat Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.....	3
E. Landasan Hukum	3
F. Tugas dan Fungsi.....	4
G. Organisasi.....	5
BAB II	10
A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024	10
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2021.....	10
C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021.....	11
D. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021.....	26
E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	27
BAB III	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan	7
Tabel 2.	Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan.....	8
Tabel 3.	Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021.....	8
Tabel 4.	Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021	8
Tabel 5.	Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan Anggaran Tahun 2021	11
Tabel 6.	Perincian Jenis Belanja DIPA BA.29 Pusdiklat SDM LHK TA.2021.....	25
Tabel 7.	Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusdiklat SDM LHK TA. 2021	25
Tabel 8.	Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA.2021	25
Tabel 9.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2021.....	27
Tabel 10.	Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021	29
Tabel 11.	Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021 ...	30
Tabel 12.	Rincian Anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Akun Tahun 2020 (Satker Pusat Diklat SDM LHK 400210).....	31
Tabel 13.	Efektifitas Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021.....	34
Tabel 14.	Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021.....	35
Tabel 15.	Rasio realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 untuk target jangka menengah.....	36
Tabel 16.	Target dan Realisasi per Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021	39
Tabel 17.	Target dan Realisasi Diklat Administrasi Lingkup Pusdiklat SDM LHK.....	40
Tabel 18.	Target dan Realisasi Diklat Fungsional lingkup Pusdiklat SDM LHK.....	40
Tabel 19.	Target dan Realisasi Diklat Teknis lingkup Pusdiklat SDM LHK.....	41
Tabel 20.	Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2021	42
Tabel 21.	Kriteria penilaian pengelolaan KHDTK-HD	47
Tabel 22.	Index Nilai KHDTK yang Dikelola	47
Tabel 23.	Sebaran lulusan tenaga menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2020	51
Tabel 24.	Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK.....	6
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK	38
Gambar 3. Sebaran Pelaksanaan Pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK Tahun 2021	43
Gambar 4. Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3).....	45
Gambar 5. Para Siswa SMK Kadijaten sedang mengikuti Pelatihan Simulasi Kebakaran Hutan	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Pusat DiklatSDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024	57
Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja Tahunan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024	59
Lampiran 3. Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021	88
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	89

SINGKATAN-SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUP	: Kelompok Usaha Produktif
LH	: Lingkungan Hidup
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	: Laporan Kinerja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
P2SDM	: Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PK	: Perjanjian Kinerja
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RSKKNi	: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMKK	: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan akuntabilitas kinerja masing masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Penyelenggaraan sistem pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tujuan seluruh negara di dunia. Tujuan tersebut menjadi sebuah prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Demikian juga dengan pemerintah Republik Indonesia yang juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, pemerintah berkewajiban melaporkan kinerja dalam bentuk akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor P. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan berkekuatan hukum (*legitimate*) yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan hasil evaluasi kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan pada waktu yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang.

C. Pengertian

1. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
2. Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
4. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
6. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
7. Laporan Kinerja(LKj) Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.
8. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.
11. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan.
12. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

D. Manfaat Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah

Manfaat LKj Instansi Pemerintah yaitu untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Instansi Pemerintah adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

- 8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk-II/ 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk-Setjen/Set.1/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 12) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tanggal 11 September 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024;
- 13) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.208/DIK/PU/WAS.0/9/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 14) Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184 /DIK/PU/REN.0/8/2021 tanggal 04 Agustus 2021 Perubahan SK.177/DIK/PU/REN.0/7/2021 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Refocusing dan Realokasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
- 15) Surat Pengesahan DIPA Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 28 Desember 2021.

F. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk-II/ 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;

- 2) Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengakuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan;
- 5) Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 7) Pembinaan teknis pengelolaan sarana prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan pusat.

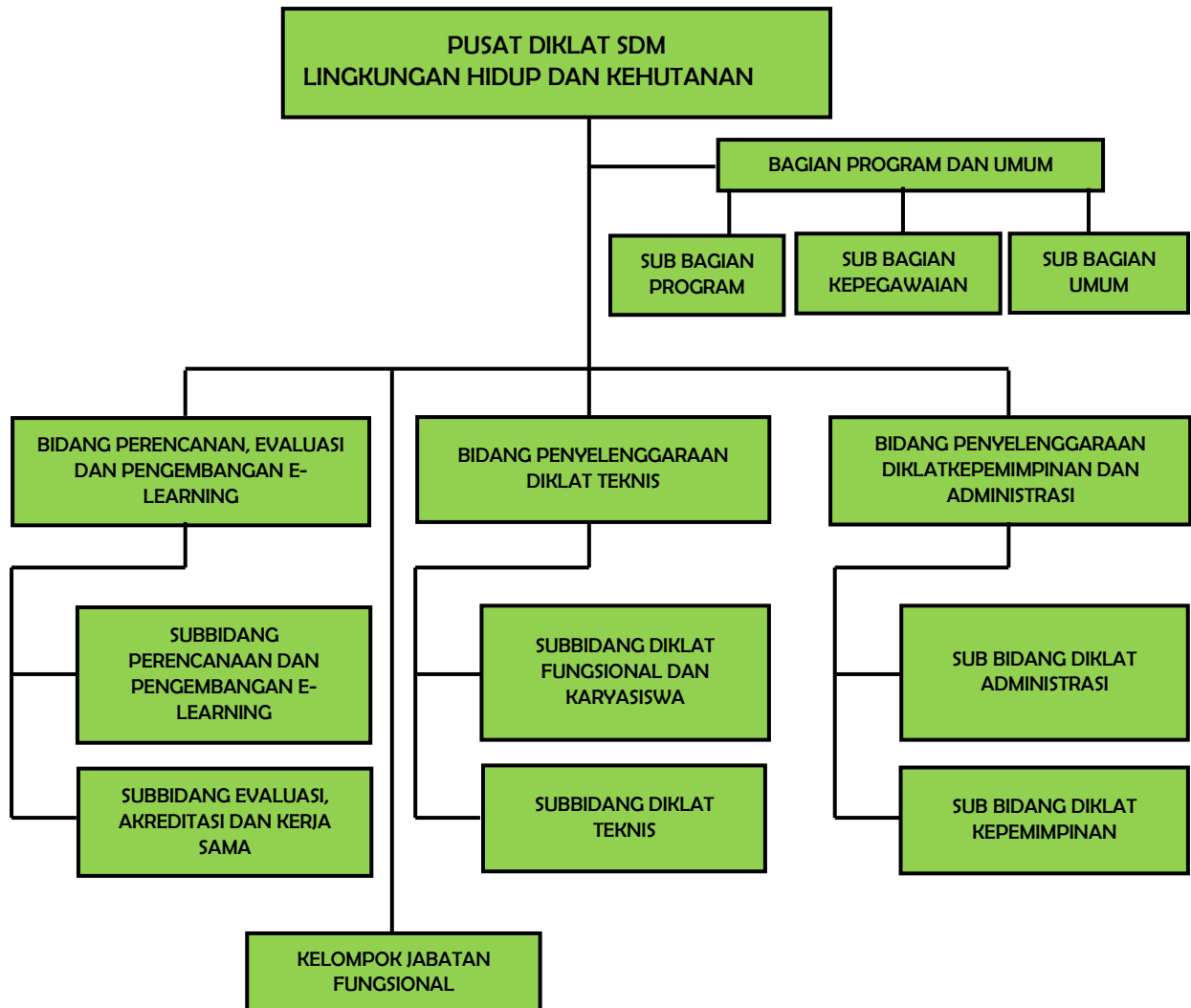
G. Organisasi

1. Struktur Organisasi

Pada tahun 2021 terdapat perubahan struktur organisasi, sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.
2. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.
4. Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan umum.

Struktur organisasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Gambar 1.

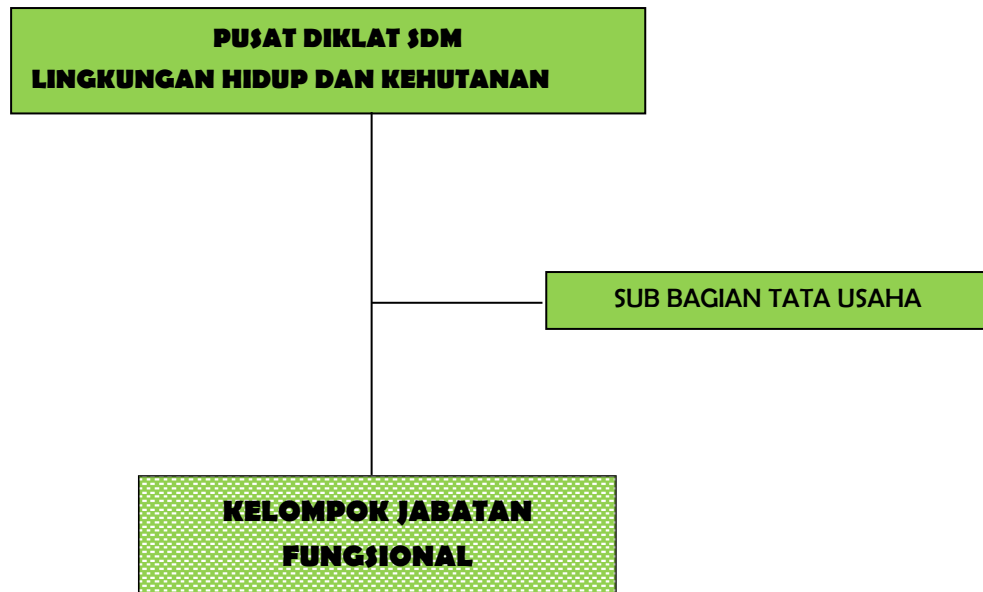


Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk-II/ 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbaru disajikan pada Gambar 2



Gambar 2. Struktur Organisasi Terbaru Pusat Diklat SDM LHK

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 adalah sebanyak 118 orang, terdiri dari pejabat Struktural sebanyak 11 orang, pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 25 orang, pejabat Fungsional Arsiparis/Pranata Komputer sebanyak 1 orang, pejabat Fungsional Umum sebanyak 61 orang, CPNS sebanyak 1 orang dan Tenaga Honor/Upah/Kontrak 25 orang. Keadaan pegawai di Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan pada Desember 2021 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	11
2	Fungsional Widyaiswara	25
3	Fungsional Arsiparis/Pranata	1
4	Fungsional Umum	51
5	Fungsional Tertentu	4
6	CPNS	1
7	Tenaga Honor/Upah/Kontrak	25
Jumlah		118

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan																Jumlah (orang)	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Pusat Diklat SDM LHK	6	5	4	8	5	7	25	7	11	1	2	4	8	0	0	0	0	118
Jumlah	28					50				15				0				

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 3. Keadaan Pegawai pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021.

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor / Ph.D / S-3	7
2	Master / Magister / S-2	28
3	Sarjana / S-1	21
4	Diploma	11
5	SLTA	40
6	SLTP	7
7	SD	4
Jumlah		118

Keterangan: Termasuk Tenaga Honor/Upah/Kontrak

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Kelas	3.120	10	360	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
2	Ruang Diskusi	120	2	122	Baik	Fasilitas LCD Projector, Screen, AC, Papan Flip chart, Meja kursi, Komputer, Sound system, printer
3	Ruang Makan	240	1	200	Baik	Fasilitas AC, Tapedack, Meja dan Kursi

No.	Prasarana	Luas (m2)	Jumlah (Unit)	Daya Tampung (orang)	Kondisi	Keterangan
4	Aula	362	1	200	Baik	Fasilitas AC, LCD, Screen, Podium, Sound system, Laptop, Meja dan Kursi
5	Asrama	5.026	1	140	Baik	Fas : AC, TV, kamar mandi dalam, tempat belajar, Hall/Gordon
6	Perpustakaan	105	1	20	Baik	Fas : Full AC, Koleksi buku, Desktop, printer, Wifi
7	Media Center	105	1	10	Baik	Fasilitas AC, Komputer Spesifikasi Khusus, Printer, Wifi
8	Tempat Ibadah (Mesjid)	185	1	120	Baik	Masjid As – Salam
9	Laboratorium Bahasa Inggris dan Komputer	122	2	20	Baik	Fasilitas lengkap : AC, computer, software Bahasa Inggris, LCD Projector, Screen, Printer, Sound System
					Baik	Ruang Ulin: Fasilitas Full AC, PC. Komputer, Server, LCD Projector, Printer, Flip Chart, Layar LCD, Meja Kursi, dll
10	Rumah Dinas	147	1		Baik	Printer, Flip Chart, Layar LCD, Meja, Kursi, dll
11	Sarana Olah raga	300	3		Baik	Fasilitas Alat Kebugaran (fitness), AC
12	Gedung Kantor	1.380	1		Baik	
13	Ruang Laktasi	20	1		Baik	
14	Ruang Klinik	8	1		Baik	
15	Ruang Arsip	52	1		Baik	Fasilitas AC
16	Kendaraan Roda 6		2		Baik	Bus dengan kapasitas 24 orang
17	Kendaraan Roda 6		2		Baik	Bus dengan kapasitas 24 orang
18	Kendaraan Roda 4		15		Baik	14 Minibus, 1 Micro Bus
19	Kendaraan Roda 2		5		Baik	
20	Pick Up		1		Baik	
21	Mobil Patroli		1		Baik	
22	Komputer P.C.		138		Baik	138 Baik
23	LCD Projector		27			17 Baik, 3 RR, 7 RB
24	Digital Camera		25			20 Baik, 5 RB
25	Video Camera		2		Baik	2 Baik
26	Printer		137		Baik	137 Baik
27	Genset		2		Baik	Kapasitas 150 KVA dan 50 KVA
28	Total Station		2		Baik	
29	Theodolite Digital		10		Baik	

Sumber data : Sub Bagian Umum

Keterangan : RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK.208/DIK/PU/WASS.0/9/2020 tanggal 14 September 2020 mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 Nomor P.07/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tahun 2020-2024 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan kediklatan, baik diklat administrasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional dan kependidikan.

Pusat Diklat SDM LHK merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Badan P2SDM yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan diklat aparatur dan non aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan diklat dan kependidikan selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan tercantum dalam dokumen Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024. Matriks Renstra Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Lampiran 1.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2021

Penyusunan rencana kerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yang berisi sasaran dan program serta rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan laporan kinerja (LK) Pusat Diklat SDM LHK.

Pada Rencana Kerja tahun 2021 ini mewadahi dinamika perubahan pola penyelenggaraan pelatihan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan mengembangkan pelatihan secara jarak jauh (e-learning), dimana dengan pelatihan secara e-learning bisa menjawab tantangan yang terjadi yaitu Pandemi Covid-19 dan juga dengan pelatihan secara e-learning pelaksanaan pelatihan sasaran peserta lebih banyak dan anggaran yang diperlukan lebih sedikit.

Rencana kerja Pusat Diklat SDM LHK tahun 2021 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam tahun anggaran 2021. Dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Pusdiklat SDM LHK perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum dan tertib administrasi dan keuangan.

Berdasarkan kebijakan baru mengenai redesain sistem perencanaan dan penganggaran maka penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021 harus mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output yang sudah ditetapkan. Pagu anggaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Pagu Refocusing IV lingkup Badan P2SDM Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp34.097.168.000,-. Dengan adanya pagu anggaran tersebut, disusunlah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja tahun 2021. Rincian Rencana Kerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 sesuai Pagu Refocusing IV lingkup Badan P2SDM Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Rencana Kerja IKK Pusat Diklat SDM LHK berdasarkan Anggaran Tahun 2021

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu(Rp).	Keterangan
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	a. Tersedianya SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 2.768 orang	14.582.360.000,-	merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
	b. Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) sebanyak 35 orang	2.674.500.000,-	
	c. Nilai KHDTK yang dikelola sebesar 67 poin (7 unit)	65.000.000,-	
2. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (SMKK)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.364 orang	939.808.000,-	

C. Rencana Kinerja/Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021

Rencana Kinerja merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pada Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung penyelenggaraan diklat dan kependidikan dengan total anggaran kediklatan sebesar Rp.34.097.168.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) unit kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning yang dijabarkan dalam elemen kegiatan:
 - a. Perencanaan dan Pengembangan E-Learning, komponen kegiatannya yaitu
 - 1) Hibah Luar Negeri

Pada tahun 2021, Pusat Diklat SDM LHK masih melanjutkan program hibah kerjasama dari Forest Investment Programme (FIP). Forest Investment Programme (FIP) bertujuan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan mitigasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di daerah serta untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat serta komunitas lokal tentang REDD+ dan pengelolaan hutan lestari di tingkat lokal dan provinsi. Indonesia sedang merencanakan dan melaksanakan perubahan-perubahan signifikan dalam pengelolaan hutan.

Pusat Diklat SDM LHK sebagai lembaga diklat kehutanan mendukung program Forest Investment Program (FIP) dalam menyelenggarakan diklat serta menyediakan sarana dan metodologi kediklatan yaitu menyiapkan kurikulum dan modul diklat dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah : Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) Bagi KPH Dan Pemerintah, Kompilasi / adaptasi materi, termasuk terjemahan (workshop), Pengembangan Modul Baru (Modul Elektronik), Pengembangan Modul Baru (Modul Klasikal), Training on Product Development (2 days, 50 person), Training on Digital Marketing (4 days, 300 person), Support for Specialized Training Such as Fasilitator for Private Extension, Competence Test for Forest Ranger and Extension, Forest Ranger (Polisi Hutan), Classical, Blended Learning or Pure E Learning for various trainings dan Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli (2 angkatan, 80 Orang). Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 sebesar Rp 7.957.579.000,-.

* Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli (2 angkatan, 80 Orang) dimasukkan ke komponen pelatihan fungsional dan Classical, Blended Learning or Pure E Learning for various trainings masuk ke komponen pelatihan teknis sehingga realisasi peserta pelatihan dapat diakomodir ke dalam IKK Pusdiklat SDM LHK Tahun 2021.

2) Nilai KHDTK yang dikelola

Indikator kinerja kegiatan KHDTK adalah Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat sebanyak 7 Unit dengan nilai 67 Poin sebagai sarana pembelajaran kediklatan KHDTK adalah harus bisa menjadi contoh dalam pengelolaan KHDTK dari pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan juga sarana prasarana penunjang pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan penilaian pengelolaan KHDTK di 7(tujuh) Unit KHDTK Pada Tahun 2021 dengan target nilai sebesar 67 Poin. Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini setelah adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam pagu tahun 2021 adalah Rp 65.000.000,-.

b. Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama

Komponen kegiatan pada sub bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama yaitu:

1) Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan diklat dan merumuskan penyelesaiannya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelaksanaan diklat ke depan. Kegiatan ini terdiri dari : Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, LKj, dan penyusunan statistik diklat. Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat. Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 setelah adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran adalah sebesar Rp89.590.000,-.

2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 setelah adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran adalah sebesar Rp12.418.000,-.

3) Pengelolaan Informasi Kediklatan

Pada era informasi dan komunikasi yang semakin canggih, maka diklat lingkungan hidup dan kehutanan telah mengembangkan suatu teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperluas publikasi kediklatan serta akselerasi komunikasi kediklatan di seluruh unit kerja lingkup Pusdiklat SDM LHK melalui website <http://portal.pusdiklatsdmlhk.id> untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kediklatan/website dialokasikan anggaran dalam pagu sebesar Rp27.630.000,- .

4) Akreditasi Kelembagaan Diklat Eksternal dan Internal

Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan diperlukan kegiatan akreditasi kelembagaan diklat eksternal dan internal. Akreditasi lembaga diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur lembaga diklat. Lembaga diklat internal adalah seluruh BDLHK sedangkan lembaga diklat Eksternal adalah Pusat Diklat SDM Perhutani. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 adalah sebesar Rp184.195.000,-.

5) Buku Terbitan/Majalah/Leaflet

Dalam rangka publikasi dan informasi program dan hasil diklat serta sebagai salah satu upaya pengembangan profesi widyaiswara, maka diterbitkan majalah kediklatan dan penerbitan leaflet, majalah dan buku. Majalah dan buku diklat ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait (pengguna diklat), sehingga semua pihak terkait akan memperoleh informasi kediklatan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp 128.450.000,-.

2. Penyelenggaraan Diklat Teknis

a. Sub Bidang Diklat Teknis, komponen kegiatannya yaitu :

1) Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan. Sebagai pembina teknis pelaksanaan pelatihan di seluruh BDLHK maka Pusat Diklat SDM LHK bertugas melakukan pembinaan teknis dalam hal pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan memastikan penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal penerapan kurikulum pelatihan, bahan ajar dan standar operasional kegiatan pelatihan. Pelatihan teknis yang diselenggarakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendamping (Secara E-learning). Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK yang diikuti oleh 501 orang sebanyak 5 tahap (16 Angkatan). Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat di dalamnya secara berkesinambungan. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp234.030.000,-.
- Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Pelatihan yang diikuti oleh 28 Orang peserta ini bertujuan untuk memberikan pemahaman total tentang pentingnya pembangunan kehutanan berkelanjutan serta penerapan pengelolaan hutan produksi tanpa mengabaikan nilai kelestarian alam. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp2.000.000,-.
- Pelatihan Identifikasi Jenis Satwa Liar Pelatihan ini merupakan kerjasama dengan WCS dan Ditjen Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE yang diikuti oleh 43 Orang Peserta. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi jenis satwa liar dilindungi. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp2.000.000,-.
- Pelatihan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat. Pelatihan ini diikuti oleh 40 Orang peserta dengan anggaran Rp2.000.000,-. Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan dapat membangun persepsi untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai GANIS PHPL PKB.

- Pelatihan Ganis PHPL Pembinaan Hutan. Pelatihan ini memberikan pengetahuan terkait Kebijakan PHPL, Teknik dan Sistem Silvikultur, Persemaian/Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Penjarangan, Perlindungan hutan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, HCVF, PHBM, Batas Hutan Partisipatif, serta Manajemen Konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 40 Orang dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,-.
- Pelatihan Ganis PHPL Perencanaan Hutan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja terhadap substansi teknis kehutanan seperti penataan Areal Kerja. Mata Pelajaran Diklat Perencanaan Hutan antara lain : Kecerdasan Spritual dan Emosional (ESO), Kebijakan PHPL, Teknik dan Sistem Silvikultur, Pemetaan dan Pengetahuan SIG, Inventarisasi Hutan, Penyusunan RTT, Pengenalan Jenis Pohon dilindungi, Pengukuran Dimensi Pohon. Pelatihan ini diikuti oleh 40 Orang dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,-.
- Pelatihan Identifikasi dan Pengenalan Jenis Kayu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan idenifikasi jenis kayu serta sifat-sifat dan teknologi serta kegunaan kayu. Pelatihan ini diikuti oleh 40 Orang peserta dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,-.
- Pelatihan Pengambilan Sampel Air. Pengambil Contoh Uji Air adalah seseorang yang bertugas melakukan pengambilan contoh uji air sesuai dengan metode standar pengambilan contoh uji untuk keperluan pengawasan penataan peraturan, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyidikan kasus lingkungan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami tentang pengujian sampel air yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengerti proses hingga manfaat dilakukannya pengujian sampel air. Pelatihan ini diikuti oleh 20 Orang dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,-.
- Classical, Blended Learning or Pure E Learning for Various Trainings. Pelatihan teknis dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK menggunakan sumber dana Hibah Luar Negeri yang diselenggarakan di Pusat Diklat SDM LHK dan 7 (tujuh) BDLHK sebesar 3.578.680.000,-.

2) Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan

Berdasarkan RPJMN dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung pencapaian pada tiga agenda pembangunan/Prioritas Nasional, salah satunya adalah “PN-1 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas”. Pada tahun 2021 terdapat redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang mana terdapat perubahan pada output Pelatihan. Pada tahun ini Pelatihan SDM Non Aparatur LHK dibuat terpisah dengan Pelatihan SDM Aparatur LHK sehingga memiliki output

tersendiri. Non aparatur LHK disini adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada SDM yang langsung menangani tapak seperti SDM pengelolaan KPH. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, direncanakan Pusat Diklat SDM LHK akan menyelenggarakan Pelatihan SDM Non Aparatur LHK sebanyak 480 Orang, tetapi dengan adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran semua kegiatan pelatihan SDM Non Aparatur LHK dilaksanakan di BDLHK sebanyak 2.744 Orang dan Pusat Diklat SDM LHK sebagai Pembina Teknis akan mengadakan Penyusunan Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) Pelatihan SDM Non Aparatur, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Sebelum dilaksanakannya Pelatihan SDM Non Aparatur LHK perlu adanya penyusunan NSPK. NSPK merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh sebuah instansi/lembaga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-.

3) Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LH

Salah satu arahan Menteri LHK, pembangunan SDM LHK juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, yang kedepannya juga dapat mendukung program kerja pemerintah yaitu Kartu Pra Kerja. Pelatihan vokasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dan berdaya saing dalam dunia kerja khususnya dunia usaha dan dunia industri.

Dalam rangka mendukung Program 4 KLHK yaitu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pusklat SDM LHK akan melaksanakan 6 jenis pelatihan vokasi dengan total target peserta sebanyak 240 orang, tetapi dengan adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran semua kegiatan pelatihan SDM Non Aparatur LHK dilaksanakan di BDLHK sebanyak 1.338 Orang dan Pusat Diklat SDM LHK sebagai Pembina Teknis akan mengadakan Penyusunan Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Sebelum dilaksanakannya Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK perlu adanya penyusunan NSPK. NSPK merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh sebuah instansi/lembaga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Anggaran yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-.

4) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan Pusdiklat SDM LHK tahun 2021 adalah untuk mencapai sasaran tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan yang terampil. Indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan adalah tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, sebanyak 478 Orang. Pusdiklat SDM LHK sebagai pembina teknis bagi SMK Kehutanan Negeri dan terdapat di 5 lokasi yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dan SMK Kehutanan Negeri Manokwari melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan, Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dengan output kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Pembinaan.

Untuk mencapai output tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah : Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan, Pembinaan Teknis SMK Kehutanan, Pengembangan SMK Kehutanan serta Lomba Literasi Hijau. Terdapat penghematan anggaran untuk membiayai kegiatan ini sehingga pagu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan tahun 2021 adalah sebesar Rp939.808.000,-

b. Diklat Fungsional dan Karyasiswa

1) Diklat Fungsional

Pada tahun 2021 terdapat satu jenis pelatihan fungsional dengan anggaran dari Hibah Luar Negeri yaitu:

- **Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli**

Pelatihan ini merupakan Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan yang dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan November 2021. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari Eselon I KLHK sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah 80 Orang. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp2.375.540.000,- berasal dari sumber dana Hibah Luar Negeri.

- **Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL)**

Pelatihan Pembentukan Fungsional PEDAL dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus, dan 14 Agustus 2021. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 39 orang.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan, yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah Peningkatan Kapasitas SDM. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan kekurangan biaya pendidikan karyasiswa. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp41.800.000,-.

2) **Terwujudnya lulusan pendidikan karya siswa (S2 dan S3) bagi SDM LHK.**

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks permasalahannya, perlu dukungan SDM yang profesional sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. SDM yang diperlukan adalah yang menguasai dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Pasca Sarjana. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- **Pendidikan Magister (S-2)**

Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusdiklat SDM LHK seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri. Untuk Karyasiswa tahun pertama pada tahun 2021 sebanyak 7 orang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkualifikasi pendidikan S-2. Pendidikan program S-2 target lulusan tahun 2021 sebanyak 30 orang, dengan adanya Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 adalah sebesar Rp1.849.410.000,-.

- **Pendidikan Doktor (S-3)**

Pendidikan Doktor (S-3) Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan S-3. Adapun target lulusan tahun 2021 sebanyak 5 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu tahun 2021 sebesar Rp611.351.000,-.

- **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan**
Selain kegiatan akademis dan operasional karyasiswa sebagaimana di atas, dalam mendukung pendidikan Pasca Sarjana terdapat kegiatan administrasi pengelolaan pendidikan pasca sarjana yang terdiri dari tes dan pendaftaran program pasca sarjana, presentasi lulusan karyasiswa, komisi pertimbangan pasca sarjana, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Kegiatan ini juga diperuntukan bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor/donor/bantuan lembaga/instansi di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu sebesar Rp213.739.000,- pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terkelolanya pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. **Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi dijabarkan dalam 2 (dua) Sub Bidang yaitu :**

a. **Diklat Kepemimpinan**

Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II tetapi biaya dibebankan kepada instansi pengirim peserta sedangkan Pusat Diklat SDM LHK hanya memfasilitasi peserta dalam keikutsertaan pelatihan tersebut dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada penyelenggara yaitu LAN dan Badan Diklat Provinsi, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp10.600.000,-.

b. **Diklat Administrasi**

- **Pelatihan Dasar CPNS**

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran semua diklat yang telah direncanakan di Pusat Diklat SDM LHK dialihkan menjadi Diklat Administrasi yaitu Pelatihan Dasar CPNS, dikarenakan telah selesainya proses seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 serta peserta yang lulus telah melaksanakan tugas di instansi masing-masing. Pelatihan Dasar CPNS akan dilaksanakan secara e-learning dengan jumlah peserta 616 orang dan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.639.431.000,-.

- **Training Of Trainer Substansi Pelatihan**

Training of Trainer Substansi adalah Pelatihan untuk pengajar yang dilakukan secara e-learning. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan bagi para pelatih/pengajar dapat memahami dan menyampaikan kembali materi pelatihan tersebut kepada peserta Pelatihan yang akan diampunya. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh 140 Orang peserta dengan biaya sebesar Rp130.830.000,-.

- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dilaksanakan secara Blended Learning. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 40 Orang dengan anggaran sebesar Rp269.530.000,-.

- Pendukung Kediklatan

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan, yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah :

- 1) Workshop Pembekalan Pelatihan Dasar CPNS. Kegiatan ini merupakan workshop pembekalan bagi pengampu Pelatihan Dasar CPNS yaitu penyamaan persepsi terkait kurikulum serta agenda dan peraturan terbaru terkait penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp56.820.000,-.
- 2) Workshop E-Learning Bagi Sub Admin Pelatihan. Kegiatan ini merupakan workshop pembekalan bagi sub admin penyelenggara pelatihan E-Learning. Workshop ini direncanakan diikuti oleh 60 orang dengan anggaran Rp36.330.000,-.

4. Layanan Program dan Umum dijabarkan ke dalam 3 Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program

- Komponen kegiatan sub bagian program adalah dukungan manajemen dan pelaksana tugas. Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk kegiatan ini adalah komponen :

- Pembuatan Renja, dan Monitoring IKK

Rencana Kerja (Renja) dibuat setiap tahun yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai perencanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana kerja wajib disusun oleh suatu instansi/lembaga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Monitoring IKK perlu dilaksanakan guna memonitor perkembangan pencapaian IKK. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp177.147.000,-.

- Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, perlu disusun dokumen perencanaan yaitu Perencanaan dan Penyusunan Program Anggaran (RKAKL/DIPA). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program anggaran ini terdiri dari kegiatan konsultasi/koordinasi anggaran, menghadiri rapat-rapat terkait

anggaran, pelaksanaan revisi anggaran tahun 2021 di tingkat Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan revisi tingkat DJA serta penyusunan anggaran tahun 2022. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 adalah sebesar Rp48.204.000,-.

- **Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015**

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusdiklat SDM LHK dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui prinsip : komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp61.003.000,-.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan, yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah :

- **Renja, Monitoring IKK**

Rencana kegiatan merupakan sebuah rancangan sebelum kegiatan dilaksanakan, agar pelaksanaan lebih terstruktur dan tertata dengan baik. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp47.423.000,-.

- **Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran**

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program anggaran ini terdiri dari kegiatan konsultasi/koordinasi anggaran, serta menghadiri rapat-rapat terkait anggaran. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 adalah sebesar Rp78.062.000,-.

- b. **Sub Bagian Kepegawaian, komponen kegiatannya yaitu :**

- **Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk, kegiatan ini :**

- **Kepegawaian**

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara Pusat Diklat SDM LHK diperlukan anggaran untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan mutasi/administrasi kepegawaian (formasi, kenaikan pangkat, jabatan, laporan-laporan kepegawaian Triwulan 1, 2, 3, dan 4 semester 1, 2 dan tahunan), pembelian ATK, pembinaan/supervisi/ koordinasi pendidikan dan kediklatan serta

mengikuti rapat-rapat/konsultasi. Anggaran yang disediakan dalam pagu tahun 2021 untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp49.265.000,-.

- **Peningkatan Kompetensi Pegawai**
Kompetensi dan pengetahuan pegawai Pusat Diklat SDM LHK harus selalu ditingkatkan kualitasnya sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai adalah dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, dan seleksi widyaiswara. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pagu APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp13.150.000,-.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan, yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah :

- **Kewidyaiswaraan.** Salah satu faktor untuk menjadi lembaga diklat yang berkualitas adalah tersedianya Widyaiswara yang kompeten dalam mengampu mata diklat. Untuk itu perlu ditunjang dengan pelayanan kesekretariatan Widyaiswara serta pengembangan profesi. Kebutuhan Kesekretariatan widyaiswara antara lain adalah pembelian ATK dan bahan operasional komputer, fotocopy, biaya rapat-rapat, sedangkan untuk pengembangan profesi antara lain penelaahan DUPAK, penyusunan tabulasi angka kredit jabatan fungsional widyaiswara, penelitian kediklatan dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp177.433.000,-.

c. **Sub Bagian Umum, komponen kegiatannya yaitu :**

- **Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas:** yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk, kegiatan ini:
 - **Ketatausahaan/BMN/Kuangan**
Dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga kediklatan dan peserta diklat diperlukan anggaran untuk membiayai kegiatan Ketatausahaan/BMN/Kuangan. Kegiatan tersebut digunakan untuk operasional perpustakaan, rapat-rapat pembahasan serta koordinasi/konsultasi ketatausahaan/BMN/Kuangan. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp105.800.000,-.

- **Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, TPPK)**
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak dari 98 orang pegawai PNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Pada tahun 2021, pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp13.005.250.000,-.
- **Operasional Perkantoran**
Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran (langganan koran dan majalah, biaya operasional asrama, gaji petugas pramu bakti/teknisi/satpam, pengemudi, honor pengelola kegiatan, langganan internet, fotocopy, penggandaan, penjilidan, biaya rapat-rapat, jasa pos dan giro, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan listrik, langganan telepon, air dan gas). Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2021 adalah sebesar Rp2.591.124.000,-.
- **Honor Pengelola Keuangan**
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan hak dari pengelola kegiatan antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Uang Persediaan, Pengelola SAI dan BMN, Pengelola PNBP, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang. Anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp268.448.000,-.
- **Perawatan Sarana Perkantoran**
Kegiatan ini terkait dengan biaya operasional dan perbaikan peralatan kantor berupa AC Split, Pompa air, Mesin potong rumput, Personal *Computer*, Peralatan meubeler, Peralatan Fitness, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan LCD Projector, Peralatan Karaoke, Genset, Pemeliharaan Inventaris kantor, sehingga perangkat kerja dimaksud dapat berfungsi dan layak digunakan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp258.424.000,-.
- **Perawatan Kendaraan**
Kendaraan merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan meliputi: kendaraan pejabat Eselon II, kendaraan operasional roda-4, pemeliharaan kendaraan operasional roda-2, biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 6 serta biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (double gardan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp633.240.000,-.

- **Perawatan Gedung**
Kegiatan ini terkait dengan biaya perawatan gedung agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari : pemeliharaan gedung/ bangunan kantor bertingkat, pemeliharaan jaringan listrik, telepon, PAM dan gas, pemeliharaan jaringan LAN dan Internet. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp1.259.756.000,-.
- **Pengadaan Seragam Pramubakti**
Kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa pengadaan seragam pramubakti. Anggaran kegiatan ini dalam pagu APBN adalah sebesar Rp16.150.000,-.
- **Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur**
Salah satu sarana penunjang kegiatan diklat adalah kenyamanan bagi peserta diklat sehingga para peserta diklat dapat melaksanakan diklat dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah berupa pengadaan sprei, bedcover dan peralatan dapur dan asrama. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp25.050.000,-.
- **Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam**
Kegiatan ini terkait dengan pemberian penambah daya tahan tubuh yang diberikan kepada Satpam. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp 27.930.000,-.
- **Pengadaan Seragam Satpam**
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan seragam bagi satpam. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar Rp 14.628.000,-.
- **Pendukung Kediklatan**
Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan, yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah :
 - **Rumah Tangga, Perlengkapan dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan.** Dalam masa pandemi seperti ini Pusat Diklat SDM LHK dituntut agar tetap produktif sebagai lembaga pelatihan. Maka dari itu Pelatihan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-learning) merupakan solusi agar Pelatihan tetap dapat berjalan dengan semestinya. Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi pembiayaan langganan aplikasi video teleconference guna penunjang kegiatan pelatihan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp50.877.000,-.

Dari total alokasi DIPA BA.29 unit Badan P2SDM TA. 2021 tersebut, alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan diklat dan kependidikan sebesar Rp.34.097.168.000,- terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp. 24.279.589.000,- atau sebesar 71,21%, PNP sebesar Rp. 1.860.000.000,- atau sebesar 5,45%, dan sumber dana jenis belanja HLN sebesar Rp. 7.957.579.000,-atau sebesar 23,34%. Perincian alokasi per jenis belanja dan Rencana Kinerja Pusdiklat SDM LHK TA. 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 6, 7 dan 8.

Tabel 6. Perincian Jenis Belanja DIPA BA.29 Pusdiklat SDM LHK TA.2021

Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	13.005.250.000,-	38,14
52	Belanja Barang	13.134.339.000,-	38,52
	HLN	7.957.579.000,-	23,34
TOTAL		34.097.168.000,-	100,00

Tabel 7. Perincian Sumber Dana DIPA BA. 29 Pusdiklat SDM LHK TA. 2021

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Persentase (%)
1	RM	24.279.589.000,-	71,21
2	PNP	1.860.000.000,-	5,45
3	HLN	7.957.579.000,-	23,34
TOTAL		34.097.168.000,-	100,00

Tabel 8. Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK TA.2021

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume Satuan	Pagu Anggaran(Rp)
5441	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK		14.582.360.000,-
5441.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.958 Orang	11.802.860.000,-
5441.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	35 Orang	2.674.490.000,-

5441.CAG.001	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	67 poin (7 unit)	65.000.000,-
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		18.575.000.000,-
5439.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	18.100.000.000,-
5439.EAC	Layanan Umum	1 Layanan	475.000.000,-
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	478 Orang	939.808.000,-
TOTAL			34.097.168.000,-

D. Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021

Perjanjian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja, istilah penetapan kinerja telah diubah menjadi perjanjian kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA 029 Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021 dengan Nomor: SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021 antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan November 2020 kemudian Revisi Perjanjian Kinerja antara Pusat Diklat SDM LHK dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan Desember Tahun 2020, sebagaimana Lampiran 2.

E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 8 sasaran, dimana dari sasaran tersebut terdapat 2 kegiatan dengan 4 indikator kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan dimaksud merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja suatu instansi pemerintah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Diklat SDM LHK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat administrasi, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan kependidikan lingkup kementerian LHK. IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2021

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2020-2024		Target 2021	
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a.	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	35.000	Orang	2.958	Orang
		b.	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	225	Orang	35	Orang
		c.	Nilai KHDTK yang dikelola	70	Poin	67 (7 unit)	Poin
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		2.364	Orang	478	Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Reviu terhadap Dokumen Perencanaan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi operasionalisasi kebijakan tersebut di atas, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui proses diklat lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat memenuhi kebutuhan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, komitmen dan moralitas yang tinggi serta meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kerjasama di dalam melaksanakan pekerjaan atau penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, disamping guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pagu anggaran awal yang diberikan kepada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp35.800.790.000,-. Dengan adanya pagu anggaran tersebut, disusunlah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja tahun 2021. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan P2SDM Nomor S.4/P2SDM/SET.II/KEU.1/2021 Tanggal 26 Januari 2021 tentang Penyampaian Pagu Refocusing Lingkup Badan P2SDM Tahun 2021, pagu Pusat Diklat SDM LHK mengalami perubahan menjadi Rp36.769.360.000,-, dimana terjadi penambahan sebesar Rp968.570.000,-, yaitu untuk menambah anggaran kegiatan Pelatihan Dasar CPNS.

Pada Bulan Juli 2021, terdapat agenda refocusing dan realokasi belanja K/L Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Kepala Badan P2SDM Nomor S.46/P2SDM/SET/KEU.0/7/2021 Tanggal 13 Juli 2021 tentang Penyampaian Pagu Refocusing lingkup Badan P2SDM Tahun 2021, pagu Pusdiklat SDM LHK mengalami penghematan sebesar Rp1.427.819.000,- sehingga pagu Pusdiklat SDM LHK berkurang menjadi Rp35.341.541.000,-.

Pada tanggal 20 Juli 2021 Menteri Keuangan kembali mengeluarkan surat perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dengan Nomor S.629/MK.02/2021 yang kemudian disusuli oleh Memo Menteri LHK nomor M.8/MENLHK/SETJEN/SET.1/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja lingkup Kementerian LHK TA 2021. Menindaklanjuti hal tersebut,

maka dikeluarkan Surat Kepala Badan P2SDM dengan nomor S.55/P2SDM/SET/KEU.O/7/2021 perihal penyampaian Pagu Refocusing IV lingkup Badan P2SDM Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan surat tersebut, Pusat Diklat SDM LHK mengalami penghematan sebesar Rp1.244.373.000,- yang berasal dari anggaran belanja pegawai dan anggaran pendidikan menengah kejuruan kehutanan sehingga pagu Pusdiklat SDM LHK berkurang menjadi Rp34.097.168.000,-. Dengan adanya penambahan pagu anggaran tersebut maka disusunlah kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021.

Kronologis revisi anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 serta Revisi Rencana anggaran berdasarkan sumber dana dan Revisi anggaran berdasarkan kegiatan sebagaimana Tabel 10, Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 10. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN dan APBN-P Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021

No.	URAIAN	PAGU	NOMOR PENGESAHAN
1	DIPA APBN	35,800,790,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 23 November 2020
2	REVISI-1	36,769,360,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 16 Februari 2021
3	REVISI-2	36,769,360,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 07 April 2021
4	REVISI-3	36,769,360,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 07 Mei 2021
5	REVISI-4	35,341,541,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 21 Juli 2021
6	REVISI-5	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 04 Agustus 2021
7	REVISI-6	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 06 September 2021
8	REVISI-7	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 20 September 2021
9	REVISI-8	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 22 Oktober 2021
10	REVISI-9	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 01 Desember 2021
11	REVISI-10	34,097,168,000	SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 28 Desember 2021

Tabel 11. Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Pusat Diklat SDM LHK TA. 2021

x1000

No.	Tanggal Pengesahan	Pagu Semula (Rp)				Pagu Menjadi (Rp)			
		RM	PNP	HLN	JUMLAH	RM	PNP	HLN	JUMLAH
1	APBN SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 23 November 2020	25.983.211	1.860.000	7.957.579	35.800.790	25.983.211	1.860.000	7.957.579	35.800.790
2	REV-1 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 16 Februari 2021	25.983.211	1.860.000	7.957.579	35.800.790	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360
3	REV-2 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 07 April 2021	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360
4	REV-3 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 07 Mei 2021	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360
5	REV-4 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 21 Juli 2021	26.951.781	1.860.000	7.957.579	36.769.360	25.523.962	1.860.000	7.957.579	35.341.541
6	REV-5 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 04 Agustus 2021	25.523.962	1.860.000	7.957.579	35.341.541	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168
7	REV-6 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 06 September 2021	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168
8	REV-7 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 20 September 2021	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168
9	REV-8 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 22 Oktober 2021	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168
10	REV-9 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 01 Desember 2021	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168
11	REV-10 SP DIPA - 029.08.1.400210/2021 tanggal 28 Desember 2021	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168	24.279.589	1.860.000	7.957.579	34.097.168

Tabel 12. Rincian Anggaran APBN-P pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Akun Tahun 2021 (Satker Pusat Diklat SDM LHK 400210)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Refocusing
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	20.027.980.000,-	18.575.000.000,-
5439.EAC	Layanan Umum	882.980.000,-	475.000.000,-
5439.EAA	Layanan Perkantoran	19.145.000.000,-	18.100.000.000,-
5441	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	13.730.810.000,-	14.582.360.000,-
5441.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.113.231.000,-	11.802.860.000,-
5441.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2.875.000.000,-	2.674.490.000,-
5441.CA G.001	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	105.000.000,-	65.000.000,-
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	2.042.000.000,-	939.808.000,-
TOTAL		35.800.790.000,-	34.097.168.000,-

2. Reviu Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021

Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal melakukan Reviu terhadap hasil audit pada satker Pusat Diklat SDM LHK sesuai dengan Catatan Hasil Reviu (CHR) Laporan Keuangan Tahun 2021. Berdasarkan hasil reviu terhadap ringkasan Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) secara umum sudah sesuai dengan SAP. Namun masih terdapat catatan – catatan sebagai berikut :

- Pos - pos LRA belum menyajikan penjelasan revisi DIPA dari pagu awal menjadi pagu saat pelaporan, sebagai revisi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease – 19 (COVID-19), Program PEN, Realisasi pendapatan PNBP terjadi penurunan seharusnya disebabkan karena

pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuis lebih kecil dari tahun sebelumnya serta kondisi Pandemi Covid-19. Terakhir, belanja barang belum menyajikan penjelasan belanja barang terkait penanganan Covid-19 dalam bentuk tabel sesuai pedoman juklak 29.

- Neraca : Belum menjelaskan rincian persediaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 sesuai pedoman juklak 29 seperti Handsanitizer/ Desinfektan/ Masker/ Vitamin, dll.

Rekomendasi yang diberikan adalah menyajikan penjelasan atas pos LRA dan Neraca agar disesuaikan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-18/PB/PB.6/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2021 dan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29.

3. Metode Pengukuran

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang penilaian capaian visi dan misi, dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja, meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja.

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pengukuran Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan Pengukuran Capaian Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap capaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Berdasarkan pembatasan terhadap tingkat capaian kinerja yang telah disepakati oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan capaian kinerja sasaran, khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan capaiannya maksimal hanya sebesar 150%.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga, evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi capaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan apabila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Implementasi pelaksanaan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK sesuai nomenklatur dokumen perencanaan terakomodir dalam kegiatan dukungan penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan tugas lainnya pada Pusat Diklat SDM LHK. Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dalam hal pengukuran capaian kinerja, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria capaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika capaiannya melebihi 90%. Berdasarkan kriteria tersebut, maka capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK untuk kegiatan indikator kinerja pada kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sebesar 105,41%, untuk lulusan Pendidikan S2 dan S3 sebesar 100%, Nilai KHDTK yang dikelola sebesar 101,21%, dan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan 99,37%, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,49 % masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat **memuaskan**.

Pada Tahun anggaran 2021, Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yang akan dicapai, yaitu penyelenggaraan diklat aparatur

dan non aparatur SDM LHK dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelambatan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi di tingkat tapak termasuk KTH Perhutanan Sosial.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial.

Oleh karena itu, Badan P2SDM melalui Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping kelompok penerima akses perhutanan sosial dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran.

b. Efektivitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran/*outcome* Tahun 2021 dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2020, cara penilaian efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio yang dihasilkan >1 terjadi peningkatan. Apabila rasio yang dihasilkan =1 maka efektifitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dirumuskan dalam Renja/RKT, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra.

Tabel 13. Efektifitas Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi Fisik 2021	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	105,41	Efektif
		SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa	100	Efektif

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi Fisik 2021	Keterangan
		Nilai KHDTK yang dikelola	101,21	Efektif
2.	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kehutanan yang tersedia	99,37	Kurang Efektif

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) Tahun 2020 dengan capaian kinerja (fisik) Tahun 2021. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2021.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\% \text{ Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , maka capaian kinerja sasaran termasuk kategori kurang efisien. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi fisik 2020	% Realisasi fisik 2021	Efisiensi Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas SDM LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	101,71	105,41	1,04	Efisien
		SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa	73,91	100	1,35	Efisien
		Nilai KHDTK yang dikelola	100	101,21	1,01	Efisien
2.	Tersedianya Tenaga Teknis	Tenaga Teknis Menengah	100	99,37	0,99	Kurang Efisien

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi fisik 2020	% Realisasi fisik 2021	Efisiensi Kinerja	Keterangan
	Menengah Kehutanan	Kehutanan yang tersedia				
		Rata-rata			1,09	Efisien

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK memiliki rasio efisiensi dengan status **efisien** dengan rata – rata sebesar 1,09 (≥ 1), hal ini dikarenakan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK dengan hasil efisiensi capaian kinerja sebesar 1,04. Selain itu, SDM LHK yang lulus Pendidikan Karyasiswa S2 dan S3 pada tahun 2021 mencapai 100% meningkat dari tahun 2020 dibanding dengan tahun 2020 yang hanya 73,91% sehingga efisiensi capaian kinerja menjadi 1,35. Namun pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi fisik dibanding tahun 2020 untuk tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan dengan efisiensi capaian kinerja senilai 0,99. Sementara itu untuk nilai KHDTK yang dikelola, efisiensi capaian kinerja bernilai 1,01 (realisasi fisik tahun 2021 yaitu 101,21% sedangkan tahun 2020 senilai 100%).

d. Rasio realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang ada pada renstra Pusat Diklat SDM LHK menunjukkan bahwa realisasi belum terpenuhi sesuai yang ditargetkan, hal ini dikarenakan Rencana Kinerja Tahunan ini baru merupakan tahun kedua penjabaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024, namun realisasi kegiatan SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya sudah sudah melebihi dari target Renja. Secara rinci rasio/perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah disajikan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Rasio realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 untuk target jangka menengah

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra 2020-2024	Rencana					Realisasi s.d. 2021	% Capaian Kinerja	
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a	Tersedianya Kapasitas SDM Aparatur yang meningkat kapasitasnya	16.328 Orang	9.617 Orang	2.958 Orang	1.251 Orang	1.251 Orang	1.251 Orang	12.899 Orang	78,99
		b	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	225 Orang	23 orang	35 orang	45 orang	45 orang	45 orang	52 Orang	23,11
		c	Nilai KHDTK yang dikelola	70 poin	66,5 poin	67 poin	68 poin	69 poin	70 poin	67,81 poin	96,87
2	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (K3)		Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	2.364 Orang	466 orang	478 orang	474 orang	473 orang	473 orang	475 Orang	39,93

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

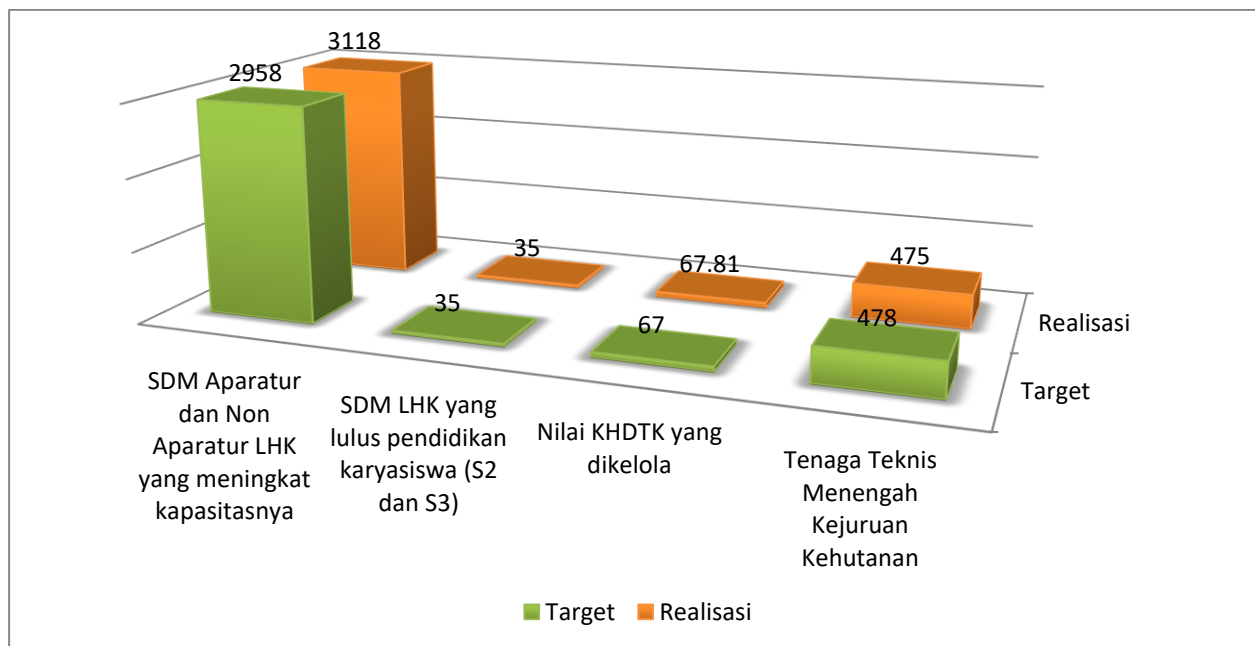
Kegiatan Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 pada Pusat Diklat SDM LHK dilakukan untuk seluruh hasil kegiatan pada penetapan kinerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 dan tertuang dalam dokumen RKA-KL Satuan Kerja Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 mencakup output kegiatan. Pada Tahun 2021 Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Kegiatan tersebut dicapai melalui 4 (empat) Indikator kinerja, yaitu:

- a. SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya;
- b. SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa S2 dan S3;
- c. Nilai KHDTK yang dikelola; dan
- d. Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK) dijelaskan pada Lampiran 3.



Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja Pusat Diklat SDM LHK dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK

a. SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang Meningkatkan Kapasitasnya

SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya merupakan salah satu tugas pokok dari Pusat Diklat SDM LHK melalui penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur yang terdiri dari:

- 1) Diklat Kepemimpinan;
- 2) Diklat Administrasi;
- 3) Diklat Teknis; dan
- 4) Diklat Fungsional.

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 dan Renja tahun 2021. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi per Jenis Diklat di Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	% Persentase
1	Diklat Kepemimpinan	-	-	-
2	Diklat Administrasi	796	896	112,56
3	Diklat Fungsional	119	119	100
4	Diklat Teknis	2.043	2.103	102,94
Jumlah		2.958	3.118	105,41

Hasil capaian indikator kinerja kegiatan adalah jumlah SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebesar 3.118 orang (105,41%).

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat administrasi, diklat teknis dan diklat fungsional merupakan implementasi upaya peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur guna mendukung pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Realisasi penyelenggaraan diklat Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK pada tahun 2021 sebanyak 3.118 orang dari target 2.958 orang dengan persentase 105,41%, untuk Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 2.928 orang terdiri dari diklat administrasi 896 orang, diklat fungsional 80 orang dan diklat teknis 1.952 orang. Dengan rincian diklat sebagai berikut :

- Terselenggaranya Diklat Administrasi pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 896 orang peserta dari target 796 orang dengan persentase 112,56%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya aparatur lingkungan hidup dan kehutanan, yang mampu melaksanakan tugas merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan diklat di bidang administrasi. Rincian penyelenggaraan diklat administrasi sebagai Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realisasi Diklat Administrasi Lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
1	Pelatihan Dasar CPNS	70	616	325	290	615	E-learning
2	Training of Trainers Substansi	3	140	182	59	241	E-learning
3	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40	40	33	7	40	Blended learning

- Terselenggaranya Diklat Fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 119 orang dari target 1119 orang dengan persentase 100%, Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Rincian penyelenggaraan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 18. Target dan Realisasi Diklat Fungsional lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Keterangan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
1	Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan 2 angkatan	5	80	40	40	80	Ang 1 dan 2 : E-learning
2	Pembentukan Fungsional PEDAL	7	30	18	21	39	Blended Learning

- Terselenggaranya Diklat Teknis bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2.043 orang dari target 2.103 orang dengan persentase 102,94%, Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Rincian penyelenggaraan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi Diklat Teknis lingkup Pusdiklat SDM LHK

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Keterangan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani dan Pendamping	4	480	432	69	501	Full E Learning
2	Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	5	28	20	8	28	Full E Learning
3	Pelatihan Identifikasi Jenis Satwa Liar	5	43	33	10	43	Full E Learning
4	Pelatihan GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat (PKB)	5	40	36	4	40	Full E Learning
5	Pelatihan GANIS PHPL Pembinaan Hutan	5	40	36	4	40	Full E Learning
6	Pelatihan GANIS PHPL Perencanaan Hutan	5	40	37	3	40	Full E Learning
7	Pelatihan Identifikasi dan Pengenalan Jenis Kayu	5	40	40	0	40	Full E Learning
8	Pelatihan Pengambilan Sampel Air	5	20	18	2	20	Klasikal
9	Classical, Blended Learning or Pure E-Learning for 38 Various Trainings	5	1.170	896	274	1.170	Classical, Blended Learning or Pure E-Learning
10.	Pelatihan Pendampingan	4	30	26	4	30	Full E Learning

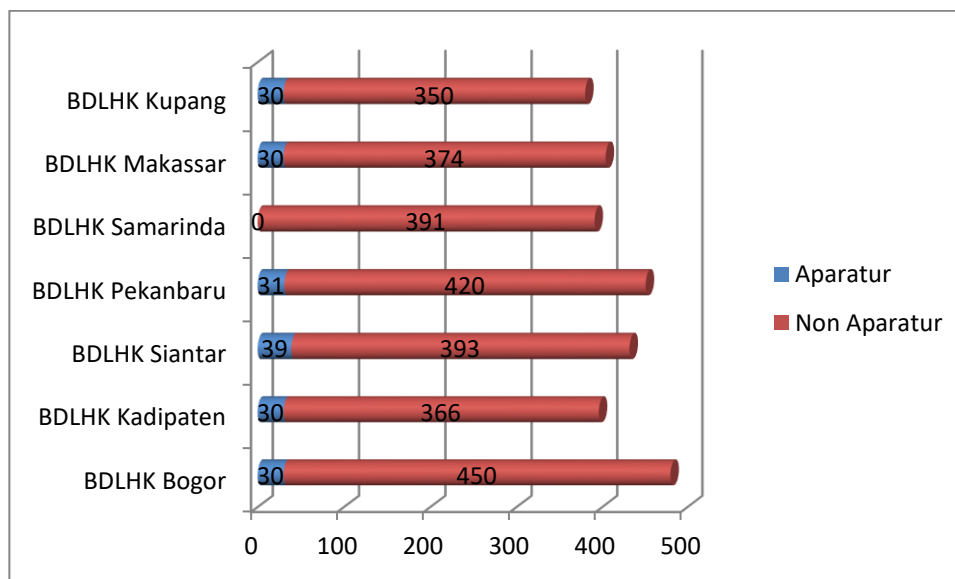
No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (Hari)	Jumlah				Keterangan
			Rencana	Realisasi			
				Lk	Pr	Jml	
	Kelompok Tani Hutan						
11.	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	7	30	29	1	30	Full E Learning
12.	Pelatihan Dasar – Dasar AMDAL	7	30	14	17	31	Full E Learning
13.	Pelatihan Dasar – Dasar AMDAL	7	30	15	15	30	Full E Learning
14.	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	7	30	23	7	30	Full E Learning

Capaian kinerja kegiatan SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya lingkup Pusat Diklat SDM LHK sudah tercapai sesuai penetapan kinerja sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20. Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2020-2024	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	2.958 orang	3.118 orang
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	35 orang	35 orang
		Nilai KHDTK yang dikelola	67 poin	67,80 poin
2.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tenaga teknis menengah kehutanan yang tersedia	478 orang	475 orang

Sebaran jumlah peserta pelaksanaan pelatihan Pusklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK tahun 2021 yaitu:



Gambar 3. Sebaran Pelaksanaan Pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK Tahun 2021

Keberhasilan tercapainya jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya didukung oleh :

- Ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
- Sumber daya manusia (widyaiswara dan pengelola diklat yang profesional dan kompeten);
- Anggaran yang memadai;
- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan yang direncanakan.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan diklat telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun pelaksanaan diklat terkendala oleh situasi pandemi COVID-19. Kebijakan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan mengubah metode pembelajaran dari klasikal menjadi metode jarak jauh (e-learning) membuat kinerja Pusat Diklat SDM LHK tetap terkendali.

Upaya tindak lanjut dengan melaksanakan diklat-diklat kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Lembaga Diklat Swasta dan lembaga lainnya.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya tahun 2021 sebesar 105,41%. dengan efisiensi capaian kinerja yaitu 1,04. Rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori efisien.

Output indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah kapasitas SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya sebanyak 3.118 orang dari total target 2.958 orang melalui kegiatan diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan administrasi bagi aparatur dan non aparatur LHK dengan outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karyawan S2 dan S3

Pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 merupakan kebijakan dari Kementerian LHK untuk meningkatkan profesionalisme bagi aparatur SDM KLHK. Maksud dilaksanakannya kegiatan pendidikan S2 dan S3 untuk menghasilkan aparatur yang memiliki kapasitas peningkatan kompetensi dalam mengemban tugasnya di KLHK.

Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai implementasi dalam meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kehutanan. Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Pasca Sarjana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

a) Pendidikan Magister (S-2)

Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri dengan target lulusan pada Tahun 2021 sebanyak 16 orang.

Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan & kemampuan pegawai Kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-2. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang lulus pendidikan program S-2.

b) Pendidikan Doktor (S-3)

Pendidikan Doktor (S-3) target lulusan tahun 2021 sebanyak 19 orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu APBN-P untuk kegiatan Tahun ketiga dan Tahun keempat pendidikan program S-3 dalam negeri pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan S-3. Hasil kegiatan tersebut adalah

meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-3. Keluarannya adalah Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-3.

Pada tahun 2021, kegiatan SDM KLHK yang lulus pendidikan karyasiswa S2 dan S3 yaitu sebanyak 35 orang dari target 35 orang (100%). **Keberhasilan** tercapainya jumlah karyasiswa S2 dan S3 didukung oleh koordinasi/konsultasi yang efektif dengan para pihak, diantaranya Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, serta Sekretariat Badan/Itjen/Ditjen lingkup KLHK. Selain itu, dikarenakan telah adanya proses adaptasi para Karyasiswa S2 dan S3 terhadap metode pembelajaran jarak jauh (e-learning) pada perguruan tinggi sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan dan penyelesaian perkuliahan bisa berjalan lancar serta tidak mengalami kendala berarti.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karyasiswa S2 dan S3 pada tahun 2021 sebesar 100%. Hasil ini meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang bernilai 73,91% sehingga dengan efisiensi capaian kinerja yaitu 1,35. Rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori efisien.

Output dari indikator kinerja kegiatan yaitu terwujudnya jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) sesuai target. Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pegawai Kementerian LHK yang meningkat kompetensi SDM-nya dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 guna mendukung pembangunan LHK.

Presentasi hasil karya studi program S2 dan S3 dilakukan secara virtual dengan menggunakan webinar meeting untuk mengurangi dampak COVID-19 dengan menjaga jarak.



Gambar 4. Presentasi Hasil Studi Karyasiswa untuk Program Doktor (S3)

c. **Pengelolaan KHDTK - HD**

KHDTK-HD merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Penguatan keberadaan KHDTK-HD didasari Peraturan Menteri LHK nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pengelolaan KHDTK-HD. Hutan Diklat dimaksudkan agar kegiatan praktek lapang peserta diklat maupun siswa SMK Kehutanan dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Selanjutnya, kerangka dan landasan hukum pengelolaan KHDTK-HD mengalami perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri LHK Nomor P 17 Tahun 2021 dimana peraturan tersebut mengalihkan kewenangan evaluasi dari eselon I teknis pembina kepada Direktorat Jenderal PKTL.

Penilaian pengelolaan KHDTK-HD dapat dinilai melalui 3 kriteria yaitu (1) Pemenuhan tujuan peruntukannya, (2) Kinerja pengelolaan KHDTK-HD, (3) Kontribusi pada tujuan pembangunan kehutanan yang selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah Indikator sebagaimana Tabel 21 berikut ini :

Kriteria	Indikator
1. Pemenuhan Tujuan Peruntukan	1 Ketersediaan Rancangan dan Road Map Penelitian yang Sesuai dengan Pertimbangan Penunjukkan Kawasannya
	2 Komposisi Jumlah Penelitian Yang Sesuai dengan Roadmapnya
	3 Ketersediaan Rancangan dan Road Map Pendidikan dan atau Latihan yang Sesuai dengan Pertimbangan Penunjukkan Kawasannya
	4 Komposisi Jumlah Pendidikan dan Atau Latihan Yang Sesuai dengan Roadmapnya
	5 Kesesuaian Potensi Biofisik Kawasan Untuk Pemenuhan Tujuan KHDTK-HD
	6 Kesesuaian Potensi Sosial Ekonomi Budaya Kawasan Untuk Pemenuhan Tujuan KHDTK-HD
2. Kinerja Pengelolaan KHDTK-HD	1 Penyelesaian tata batas
	2 Pemenuhan kewajiban keuangan pada negara
	3 Kecukupan kawasan

	4	Penataan Kawasan
	5	Inventarisasi Hutan
	6	Perencanaan SDH
	7	Pelaksanaan Rencana-Rencana Pengelolaan SDH
	8	Perlindungan dan Pengamanan Hutan
	9	Monitoring dan Evaluasi
	10	Kemandirian Pembiayaan
	11	Kemandirian Pengelolaan SDM
	12	Kemandirian Penyiapan dan Pengelolaan Sarana Prasarana
	13	Keterpaduan dengan Pendidikan Kehutanan
	14	Keterpaduan dengan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	15	Keterpaduan dengan Pembangunan Wilayah Sekitarnya
	16	Keterpaduan dengan Pengelolaan KPH sekitarnya
3. Kontribusi pada Tujuan Pembangunan	1	Keberlanjutan SDH
	2	Pelibatan Masyarakat
	3	Produk Hasil Hutan
	4	Iptek Pengelolaan Hutan

(*) Indikator berasal dari Peraturan Menteri LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P7 Tahun 2021

Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD pada Tahun 2021 adalah sebesar 67,81 poin yang telah memenuhi target pada Renstra/Renja/Perjanjian Kinerja (dari target 67 Poin atau 101,21%). Nilai tersebut merupakan hasil dari rerata Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD dari 7 KHDTK-HD di lingkup Badan P2SDM yang selengkapnya sebagaimana tabel 22 berikut :

Tabel 21. Index Nilai KHDTK yang Dikelola

No	KHDTK	Nilai Index
1	KHDTK Pondok Buluh – BDLHK Pematangsiantar	66,83
2	KHDTK Bukit Suligi – BDLHK Pekanbaru	66,64
3	KHDTK Sawala Mandapa – BDLHK Kadipaten	68,22
4	KHDTK Rumpin – BDLHK Bogor	70,86
5	KHDTK Tabo-Tabo – BDLHK Makassar	68,82

6	KHDTK Loa Haur – BDLHK Samarinda	66,64
7	KHDTK Sisimeni Senam – BDLHK Kupang	66,64
	Rata-rata	67,80

Indeks nilai KHDTK yang dikelola yaitu 67,80 poin dari target 67 poin (101,19%) yang merupakan nilai dari indikator penilaian Rencana Pengelolaan KHDTK. Nilai ini menggambarkan bahwa pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat lingkup Badan P2SDM telah berjalan dan sesuai dengan rencana pengelolaan dan memenuhi indikator-indikator tercapainya pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat. Namun demikian bila melihat tabel di atas, masih terdapat beberapa KHDTK-HD yang masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut untuk mencapai nilai pengelolaan seperti yang ditargetkan.

Keberhasilan tercapainya kegiatan KHDTK didukung oleh:

- 1) Adanya Rencana Pengelolaan KHDTK-HD jangka menengah dan pendek yang telah memberikan gambaran pengembangan KHDTK-HD sebagai sarana pembelajaran kediklatan maupun praktik siswa SMK Kehutanan.
- 2) Sinergitas pengembangan KHDTK-HD yang baik antara Balai Diklat LHK dengan SMK Kehutanan Negeri KLHK baik dari sisi SDM, pembiayaan, sarana prasarana, metodologi sehingga KHDTK-HD dapat lebih termanfaatkan secara optimal.
- 3) Pemanfaatan KHDTK-HD yang baik oleh institusi pendidikan (Universitas, SMA/SMK, SMP dan SD) dan mitra kerja pemerintah maupun swasta sehingga KHDTK-HD dapat lebih termanfaatkan optimal dan mendukung keberlanjutan pengelolaan.

Pada tahun 2021, dalam pelaksanaannya pengelolaan KHDTK-HD dapat berjalan, namun masih terdapat **kendala** diantaranya: kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola KHDTK-HD belum memadai, keterbatasan anggaran sehingga sangat tergantung dengan kerjasama/sinergitas dengan pihak lain dan kemantapan kawasan yang masih diganggu oleh beberapa pihak disekitar maupun dari luar KHDTK-HD.

Tindak Lanjut yang dilakukan adalah penambahan kuantitas dilakukan secara insidental melalui pemberdayaan siswa SMK Kehutanan, Widyaiswara, Akademisi, mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang kontributif, meningkatkan kualitas SDM pengelola KHDTK-HD melalui pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan kualitas dan kuantitas sinergitas pengembangan KHDTK-HD dengan para pihak dan meningkatkan kemantapan kawasan melalui

pemeliharaan batas kawasan, patroli, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi serta pengembangan kemitraan.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan nilai KHDTK yang dikelola pada tahun 2021 sebesar 101,21%. Hasil ini meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang bernilai 100% sehingga dengan efisiensi capaian kinerja yaitu 1,01. Rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori efisien.

Output dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengelolaan KHDTK-HD/Hutan Diklat dengan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-HD/Hutan Diklat sebesar 67,81 Poin. Adapun Outcome dari kegiatan ini yaitu tersedianya KHDTK-HD yang dikelola dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat SDM LHK berjalan lebih optimal.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan Nasional telah bekerjasama membuka Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKK) sejak tahun 2008. Terdapat 5 (lima) SMK Kehutanan Negeri Lingkup KLHK yang berada di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, dan Manokwari dengan total siswa (kelas X-XII) sebanyak 1.462 orang.

Maksud dibentuknya SMK Kehutanan adalah untuk menyediakan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang profesional, mandiri dan berahlak mulia serta siap memasuki lapangan kerja sesuai dengan kualifikasinya. Bentuk kegiatan yang mendukung pembinaan SMKK antara lain:

1. Fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan

Sebagai Instansi pembina teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM LHK melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK Kehutanan. Sertifikasi kompetensi bagi peserta didik diberikan setelah mengikuti uji kompetensi yang telah diikuti. Terdapat 4 paket kompetensi pada SMK Kehutanan Negeri lingkup KLHK yang mana setiap SMK memiliki spesifikasi kompetensi yang berbeda-beda, adapun paket kompetensi tersebut meliputi paket keahlian dan kompetensi: 1) Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH) dengan kompetensi penguji dan pengukur kayu bundar, 2) Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) dengan kompetensi pembuatan peta hasil pengolahan GPS, 3) Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH) dengan kompetensi pembuat bibit generatif, 3) Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH) dengan kompetensi pemanduan wisata alam.

2. **Pembinaan teknis SMK Kehutanan**

Kegiatan pembinaan teknis SMKK Kehutanan bertujuan untuk memberikan pembinaan teknis kepada SMKK lingkup KLHK yaitu SMK kehutanan Kadipaten, SMK kehutanan Pekanbaru, SMK Kehutanan Samarinda, SMK kehutanan Makassar dan SMK kehutanan Manokwari. Adapun kegiatannya yaitu: supervisi/monitoring/pengawasan penyelenggaraan SMK Kehutanan, menghadiri wisuda siswa SMK Kehutanan, rapat-rapat//konsultasi dengan instansi terkait, dan konsultasi/koordinasi mengikuti rapat dengan instansi terkait penyelenggaraan SMK Kehutanan.

3. **Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan**

Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK Kehutanan kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, mata pelajaran pengukuran dan perpetaan digital, kompetensi keahlian teknik produksi hasil hasil hutan mata pelajaran pengujian kayu bulat dan kayu gergajian, Kehutanan kompetensi keahlian teknik konservasi sumberdaya hutan mata pelajaran pembinaan populasi dan habitat, dan kompetensi keahlian teknologi produksi hasil hutan mata pelajaran pemanenan hasil hutan.

4. **Pengembangan SMK Kehutanan**

Pengembangan SMK Kehutanan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik melalui optimalisasi sinergitas dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sebagai SMK Model dengan berbagai keunggulan, 5 SMK Kehutanan Negeri Lingkup KLHK baik di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, dan Manokwari diharapkan menjadi pelopor dan contoh bagi sekolah kehutanan lainnya.

5. **Lomba Literasi Hijau peserta didik SMK Kehutanan Negeri**

Lomba Karya Tulis Literasi Hijau ini merupakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Kreatif. Tema besar lomba yaitu “Generasi Muda untuk Indonesia Hijau dan Tangguh”. Lomba Literasi Hijau ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan hidup dan kehutanan sehingga mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia hijau dan tangguh dalam segala aspek kehidupan. Selain itu meningkatkan dan menjaga budaya literasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan khususnya di lingkup SMK Kehutanan (SMKK, mengokohkan keinginan untuk berpartisipasi dalam membela lingkungan hidup dan kehutanan dan peserta didik bisa tetap produktif di masa Pandemi Covid 19.

Sasaran peserta lomba literasi hijau ini adalah siswa SMK Kehutanan seluruh Indonesia. Peserta lomba dapat memilih satu dari 6 (enam) tema tulisan yang disediakan sebagai berikut: a) Pemimpin

Muda yang Berwawasan Lingkungan b) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim c) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi d) Peran Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan e) Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Menjaga Martabat Bangsa f) Limbah/Sampah sebagai Sumber Ekonomi dan Energi Masa Depan. Pelaksanaan lomba ini dilaksanakan pada 7 Juni –19 Juli 2021 dan Karya Tulis yang dihasilkan dalam perlombaan ini akan dikompilasi dalam sebuah buku dan akan diterbitkan oleh BP2SDM.

Adapun Sebaran lulusan tenaga menengah Kejuruan Kehutanan Lingkup KLHK Tahun 2021 tersaji dalam tabel 22 dibawah ini:

No.	SMKK Negeri	Jumlah Siswa (orang)			
		Target (Orang)	Realisasi		
			L	P	Jumlah
1.	Kadipaten	98	77	21	98
2.	Pekanbaru	100	77	20	97
3.	Samarinda	109	81	28	109
4.	Makassar	105	80	25	105
5.	Manokwari	66	46	20	66
Jumlah		478	361	114	475

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya pengawasan perilaku dan cara belajar siswa SMKK oleh para tenaga pendidik dan kependidikan.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan ini adalah perlu pembinaan siswa secara intensif dari tenaga pendidik dan kependidikan secara bergantian dalam mengawasi perkembangan siswa agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa SMK Kehutanan Negeri.



Gambar 5. Para Siswa SMK Kadiyaten sedang mengikuti Pelatihan Simulasi Kebakaran Hutan (sumber : Wati, 2021)

Kegiatan Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) menghasilkan lulusan peserta didik sebanyak 475 orang dari target 478 orang dengan persentase 99,37%. Elemen kegiatan tersebut berupa pembinaan teknis dengan target fisik berupa 1 laporan sebesar 100%.

Efektifitas capaian kinerja kegiatan tenaga teknis menengah kehutanan yang tersedia tahun 2021 adalah 99,37% dengan realisasi hanya 475 orang dari target mencapai target yaitu 478 lulusan. Terdapat 3 (tiga) orang peserta didik yang tidak lulus karena tidak memenuhi standar minimal kelulusan yang telah ditentukan. Hasil ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang bernilai 100% sehingga dengan efisiensi capaian kinerja yaitu 0,99. Rasio yang dihasilkan <1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk kategori kurang efisien. Output dari indikator kinerja kegiatan yang mendukung jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan adalah dokumen Perencanaan dan Pembinaan berupa laporan pembinaan SMKK, dengan outcome adalah meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan Kehutanan.

B. Realisasi Anggaran

1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 adalah sebesar Rp.34.097.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp32.867.853.878,- atau sebesar 96,39%. Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 23 berikut :

Tabel 22. Pelaksanaan Capaian Anggaran IKK Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2021

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya,	14.582.360.000,-	13.404.216.203,-	91,92	2.958	Orang	3.118	Orang	105,41
		b	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3),	2.674.500.000,-	2.674.490.000,-	99,99	35	Orang	35	Orang	100
		c	Nilai KHDTK yang dikelola,	65.000.000,-	64.903.700,-	99,85	67	poin	67,81	poin	101,21
2	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan,		939.808.000,-	939.778.069,-	99,99	478	Orang	475	Orang	99,37
Rata-Rata Capaian Fisik											101,49

2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

Realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,39%, dan capaian fisik rata-rata untuk APBN-P sebesar 101,49%. Penyerapan anggaran APBN pada tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan karena tidak terselenggaranya Pelatihan Polisi Kehutanan (Forest Ranger). Permasalahan yang terjadi dikarenakan pelatihan Polisi Kehutanan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN). Sementara untuk capaian IKK Pusdiklat melebihi target yaitu sebesar 101,49% karena adanya penyelenggaraan kerjasama yang menggunakan anggaran dari mitra.

Sebagai saran dan tindak lanjut kedepannya, pelatihan-pelatihan di Pusat Diklat SDM LHK nantinya dapat diselenggarakan dengan mekanisme co-sharing dengan instansi pengirimnya.

BAB IV

PENUTUP

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perangkat organisasi atau unit kerja Eselon II yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan berada di bawah pembinaan Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan 4 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya, SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa S2 dan S3, nilai KHDTK yang dikelola, dan tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan IKK menghasilkan realisasi keuangan Tahun 2021 sebesar Rp17.083.387.972,- dari target Rp18.261.668.000,- atau 93,55%. Pagu Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebesar 34.097.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp32.867.853.878,- atau sebesar 96.39%.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 101,49 masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tergolong efisien dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai target yang dijanjikan dalam penetapan kinerja dengan rasio efektifitas pada tahun 2021 sebesar 1,01.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Pusat DiklatSDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	TARGET					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
I. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur													
Peningkata n kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	01. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01. Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten 1.1 Diklat Teknis di tingkat tapak	Orang	2310	3210	3210	3210	3210	11.550.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000	18.100.000
		02.Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK - SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya a. Diklat Teknis dan Fungsional b. Diklat Administrasi c. Diklat Kepemimpinan d. Pendukung Kediklatan	Orang	950	1251	1251	1251	1251	12.015.675	16.868.481	16.868.481	16.868.481	16.868.481
		03. SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa - SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa a. Pendidikan Program S2 Dalam Negeri b. Pendidikan Program S3 Dalam Negeri c. Pengelolaan Pendidikan	Orang	45	45	45	45	45	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		04. Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha - Pelatihan Vokasi a. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi	Orang	7000	7000	7000	7000	7000	48.000.000	49.400.000	50.900.000	52.500.000	52.500.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Komponen	Satuan	TARGET					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	02. Meningkatnya efektifitas pengelolaan KHDTK	01. Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK - Nilai KHDTK yang dikelola a. Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pengembangan Diklat	Poin	66,5	67,0	68,0	69,0	70,0	3.930.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
II. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan													
	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	01 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat - Tenaga Teknis menengah Kejuruan yang tersedia a. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan b. Dokumen Perencanaan	Orang	472	473	473	473	473	109.370.000	112.900.000	116.300.000	119.800.000	123.400.000
III. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BadanP2SDM													
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	01. Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan a. Penyusunan rencana Program, dan penyusunan Rencana Anggaran b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi c. Pengelolaan Kepegawaian d. Pelayanan umum dan Perlengkapan 02. Layanan Perkantoran a. Gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 03. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	22.640.980	24.905.078	27.395.586	30.135.144	33.148.659

Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja Tahunan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

**MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK				14.582.360.000				
		Meningkatnya kapasitas SDM LHK							
			a. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit (67 Poin)					- KHDTK Bukit Suligi, Riau - KHDTK Sawala, Majalengka (Jawa Barat) - KHDTK Loa Haur, Samarinda - KHDTK Tabo-tabo, Makassar - KHDTK Sisimenisanam, Kupang - KHDTK Rumpin, Bogor - KHDTK Pondok Buluh, Pematang Siantar (Sumatera Utara)
			b. Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	1.327 orang					Pusdiklat SDM LHK : 1.117 orang dan 7 (tujuh) Balai Diklat LHK : 30 orang (BDLHK Pekanbaru : 30 orang, BDLHK Bogor : 30 orang, BDLHK Makassar : 30 orang, BDLHK Samarinda : 30 orang, BDLHK Kupang : 30 orang, BDLHK Pematangsiantar : 30 orang, BDLHK Kadipaten : 30 orang)
			c. Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusdiklat SDM LHK

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			d. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.744 orang		Prioritas Nasional	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional	Penyelenggaraan di Balai Diklat LHK : 2.744 orang (BDLHK Pekanbaru: 420 orang, BDLHKBogor : 450 orang, BDLHK Makassar : 374 orang, BDLHK Samarinda : 391 orang, BDLHKKupang : 350 orang, BDLHK Pematangsiantar : 393 orang, BDLHK Kadipaten : 366 orang)
			e. Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.338 orang					Penyelenggaraan di Balai Diklat LHK : 1.338 orang (BDLHK Pekanbaru: 150 orang, BDLHKBogor : 150 orang, BDLHK Makassar : 204 orang, BDLHK Samarinda : 300 orang, BDLHKKupang : 234 orang, BDLHK Pematangsiantar : 150 orang, BDLHK Kadipaten : 150 orang)
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				939.808.000				
		Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	478 orang		Prioritas Nasional	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	SMKKN Kadipaten : 98 orang SMKKN Pekanbaru : 100 orang SMKKN Makassar : 105 orang SMKKN Samarinda : 109 orang SMKKN Manokwari : 66 orang
3.	Program Dukungan Manajemen				18.575.000.000				
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM							
			Layanan Perkantoran	1 Layanan		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat Diklat SDM LHK
			Layanan Umum	1 Layanan		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat Diklat SDM LHK

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Umum									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Ketatausahaan/BMN/Keuangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	105.800.000	
				Orang			- SDM	9	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Ketatausahaan/ BMN/ Keuangan	12	
				Bulan	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan Ketatausahaan/ BMN/ Keuangan	12	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	
	B	Rumah Tangga, Perlengkapan Dan Ketatausahaan PenunjangKediklatan		Rp	Masukan	:	- Dana	35.000.000	
				Orang			- SDM	9	
				Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Rumah Tangga, Perlengkapan Dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan Rumah Tangga, Perlengkapan Dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Umum									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	C	Gaji dan Tunjangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	13.355.000.000	
				Orang			- SDM	9	
				Bulan	Keluaran	:	Terpenuhinya hak pegawai	12	
				Bulan	Hasil	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	12	
	D	Operasional Perkantoran		Rp	Masukan	:	- Dana	2.627.359.000	
				Orang			- SDM	30	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya pengelolaan operasional perkantoran dengan tertib	12	
				Bulan	Hasil	:	Pengelolaan Operasional perkantoran berjalan dengan optimal	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Umum									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	E	Honor Pengelolaan Keuangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	294.974.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan	12	
				Bulan	Hasil	:	Pengelolaan Keuangan berjalan dengan optimal	12	
	F	Perawatan Sarana Perkantoran		Rp	Masukan	:	- Dana	258.401.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	12	
				Bulan	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layakdigunakan	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Umum									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	G	Perawatan Kendaraan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	633.240.000	
				Orang			- SDM	50	
				Unit	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	23	
				Unit	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layak digunakan	23	
	H	Perawatan Gedung		Rp	Masukan	:	- Dana	847.268.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	12	
				Bulan	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layak digunakan	12	
	I	Pengadaan Seragam Pramubakti		Rp	Masukan	:	- Dana	16.150.000	
				Orang			- SDM	50	
				Stel	Keluaran	:	Terlaksananya pengadaan seragam pramubakti	38	
				Stel	Hasil	:	Tersedianya seragam pramubakti	38	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Umum									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	J	Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	25.050.000	
				Orang			- SDM	50	
				Paket	Keluaran	:	Terlaksananya pengadaan peralatan asrama dan dapur	32	
				Paket	Hasil	:	Tersedianya peralatan asrama dan dapur yang layak digunakan	32	
	K	Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam		Rp	Masukan	:	- Dana	27.930.000	
				Orang			- SDM	6	
				Bulan	Keluaran	:	Terpenuhinya kebutuhan untuk menambah daya tahan tubuh bagi satpam	8	
				Bulan	Hasil	:	Petugas satpam dapat melaksanakan tugas dengan optimal	8	
	L	Pengadaan Seragam Satpam		Rp	Masukan	:	- Dana	14.628.000	
				Orang			- SDM	6	
				Stel	Keluaran	:	Terlaksananya pengadaan seragam satpam	12	
				Stel	Hasil	:	Tersedianya seragam satpam	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Layanan Program dan Umum									
Program									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Renja dan Monitoring IKK	Sub Bagian Program	Rp	Masukan	:	- Dana	114.197.000	
				Orang			- SDM	5	
				Buku	Keluaran	:	Dokumen RKT	150	
				Buku	Hasil	:	Rencana dan Program Diklat Optimal dan Terarah	150	
	B	Perencanaan Penyusunan dan Revisi Anggaran		Rp	Masukan	:	- Dana	116.665.000	
				Orang			- SDM	5	
				Dokumen	Keluaran	:	RKAKL/DIPA	13	
				Dokumen	Hasil	:	Rencana dan Program Diklat Optimal dan Terarah	13	
	C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015		Rp	Masukan	:	- Dana	60.000.000	
				Orang			- SDM	30	
				Dokumen	Keluaran	:	Dokumen ISO	1	
				Dokumen	Hasil	:	Komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan	1	
			-	Manfaat	:	Diklat berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	-		

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum									
Kepegawaian									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian	Rp	Masukan	:	- Dana	49.265.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Mutasi/administrasi kepegawaian (Formasi, Kenaikan pangkat dan jabatan)	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	
	B	Kewidyaiswaraan		Rp	Masukan	:	- Dana	200.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan kewidyaiswaraan	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Layanan Program dan Umum									
Kepegawaian									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Peningkatan Kemampuan Pegawai	Sub Bagian Kepegawaian	Rp	Masukan	:	- Dana	13.150.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan peningkatan kemampuan pegawai	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning									
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	A	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	65.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1	
				Laporan	Hasil	:	Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan diklat oleh BDLHK	1	
				-	Manfaat	:	Hutan diklat dapat dimanfaatkan secara optimal	-	

Unit Kegiatan		Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
					Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1		2	3	4	5			6	7
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	B	Hibah Luar Negeri - Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) Bagi KPH Dan Pemerintah Pusat/Daerah - Kompilasi / adaptasi materi, termasuk terjemahan(workshop) - Pengembangan Modul Baru (Modul Elektronik) - Pengembangan Modul Baru (Modul Klasikal) - ToT Blended Learning (E-Learning and Face to Face) 60 Person, 5 days - ToT Training on KKPH, 20 person, 5 days - Training on KKPH, 60 person, 60 days - ToT KPH Operasionalization and change Management, 10 person, 5 day - KPH Operasionalization and change Management Trainings, 20 person, 8 day - Training on Product Development, 7 days, 20 person - Training on Digital Marketing, 7 days, 60 person - Support for Specialized Training Such as Fasilitator for Private Extention - Competence Test For Forest Ranger And Extension Worker - Post Training Evaluation/EPD	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	7.957.579.000	
				Orang			- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan hibah luar negeri	14	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	91.633.000	
				Orang		:	- SDM	100	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	35	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	35	
				-	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	-	
	B	Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal		Rp	Masukan	:	- Dana	184.295.000	
				Orang		:	- SDM	100	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Akreditasi	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Akreditasi	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama									
Terlaksananya pembinaan pengembangan organisasi diklat	C	Jumlah Buku Terbitan/Majalah/Leaflet	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	85.150.000	
				Orang			- SDM	12	
				Edisi	Keluaran	:	Majalah Silvika	3	
				Edisi	Hasil	:	Tersedianya majalah Silvika Pusdiklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Leaflet Pusdiklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Leaflet Pusdiklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Buku Terbitan Pusdiklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Buku Terbitan Pusdiklat SDM LHK	3	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	D	Laporan Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP)	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	10.375.000	
				Orang			- SDM	35	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
	E	Laporan Pengelolaan Informasi Kediklatan		Rp	Masukan	:	- Dana	27.630.000	
				Orang			- SDM	50	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pengelolaan Informasi Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Pengelolaan Informasi Kediklatan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi									
Diklat Administrasi									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	A	Pelatihan Dasar CPNS	Sub Bidang Diklat Administrasi	Rp	Masukan	:	- Dana	2.764.001.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	616	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	616	
	B	Training Of Trainer Substansi		Rp	Masukan	:	- Dana	88.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Training Of Trainer Substansi	100	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Training Of Trainer Substansi sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	100	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi									
Diklat Administrasi									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	C	Workshop Pembekalan Pelatihan Dasar CPNS	Sub Bidang Diklat Administrasi	Rp	Masukan	:	- Dana	55.290.000	
				Orang			- SDM	3	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pembekalan Pelatihan dasar CPNS	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pembekalan Pelatihan dasar CPNS	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi									
Diklat Kepemimpinan									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan	Sub Bidang Diklat Kepemimpinan	Rp	Masukan	:	- Dana	15.000.000	
				Orang			- SDM	3	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan	1	
				Laporan	Hasil	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	15.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional	1	
				Laporan	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	1	
	B	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani Dan Pendamping (Secara E Learning)		Rp	Masukan	:	- Dana	234.030.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Non Aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani Dan Pendamping (Secara E Learning)	501	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Non Aparatur LHK yang telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani Dan Pendamping sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	501	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yangditingkatkan	C	Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	28	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Calon Auditor Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	28	
	D	Pelatihan Identifikasi Jenis Satwa Liar		Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Identifikasi Jenis Satwa Liar	43	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Identifikasi Jenis Satwa Liar sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	43	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan					Keterangan
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	E	Pelatihan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat	40	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	
	F	Pelatihan Ganis PHPL Pembinaan Hutan		Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Pembinaan Hutan	40	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Pembinaan Hutan sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan					Keterangan
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	G	Pelatihan Ganis PHPL Perencanaan Hutan	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Perencanaan Hutan	40	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Ganis PHPL Perencanaan Hutan sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	
	H	Pelatihan Identifikasi Dan Pengenalan Jenis Kayu		Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Identifikasi Dan Pengenalan Jenis Kayu	40	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Identifikasi Dan Pengenalan Jenis Kayu sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan
					Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2		3	4	5			6	7
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yangditingkatkan	I	Pelatihan Pengambilan Sampel Air	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	2.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengambilan SampelAir	20	
				Orang	Manfaat	:	Tersedianya Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Pengambilan Sampel Air sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	20	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
Terselenggaranya Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	J	Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	20.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Dokumen NSPK PelatihanSDM Non Aparatur LHK	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Dokumen NSPK PelatihanSDM Non Aparatur LHK	1	
	K	Penyusunan NSPK Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK		Rp	Masukan	:	- Dana	20.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Dokumen NSPK Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	1	
				Laporan	Hasil	:	Dokumen NSPK Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5		6		7
Penyelenggaraan Diklat Teknis								
Diklat Fungsional dan Karyasiswa								
Terlaksananya Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	A	Pelatihan Forest Ranger (Polisi Hutan)	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	2.375.540.000
				Orang			- SDM	7
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Forest Ranger (Polisi Hutan)	60
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Forest Ranger (Polisi Hutan) sehingga mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	60
	B	Peningkatan Kapasitas SDM		Rp	Masukan	:	- Dana	41.800.000
				Orang			- SDM	3
				Laporan	Keluaran	:	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM	1
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM	1

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	C	Penyelenggaraan Karyasiswa S2 SDM LHK	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	1.851.410.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-2	30	
				Orang	Hasil	:	Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-2	30	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	D	Penyelenggaraan Karyasiswa S3 SDM LHK	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	611.351.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-3	5	
				Orang	Hasil	:	Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-3	5	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan	E	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	211.739.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Dokumen persiapan dan pelaksanaan pendidikan pasca sarjana dan data lulusan karyasiswa	1	
				Laporan	Hasil	:	Administrasi pengelolaan karyasiswa berjalan dengan tertib	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penangung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis									
Diklat Teknis									
SMKKN						939.808.000			
Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	A	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan 1. Dokumen Perencanaan dan Pembinaan	Sub Bidang Diklat Teknis						
				Rp	Masukan	:	- Dana	939.808.000	
				Orang			- SDM	6	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pembinaan SMK Kehutanan	5	
				Laporan	Hasil	:	Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bertaraf internasional	5	
				-	Manfaat	:	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan lebih berkualitas	-	
JUMLAH						34.097.168.000			

Lampiran 3. Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Kegiatan		Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target		Realisasi		%
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM LHK	a. SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	14.582.360.000,-	13.404.216.203,-	91,92	2.958	Orang	3.118	Orang	105,41
			b. SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)	2.674.500.000,-	2.674.490.000,-	99,99	35	Orang	35	Orang	100
			c. Nilai KHDTK yang dikelola	65.000.000,-	64.903.700,-	99,85	67	Unit	67,81	Unit	101,21
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	939.808.000,-	939.778.069,-	99,99	478	Orang	475	Orang	99,37

Keterangan : (*) Realisasi Pusdiklat SDM LHK sebanyak 2.928, BDLHK Pekanbaru 31 orang, BDLHK Bogor 30 orang, BDLHK Makassar 30 orang, BDLHK Kupang 30 orang, BDLHK Pematangsiantar 39 orang, dan BDLHK Kadipaten 30 orang.,

30



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mariana Lubis, M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, MM

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2021

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Lulusan diklat aparatur LHK	2.958 orang*
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.744 orang*
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.338 orang*
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	35 orang
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola	67 poin (7 unit*)
3.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	478 orang**

Catatan : * Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Diklat LHK

** Total target termasuk yang dilaksanakan pada SMKKN

Kegiatan

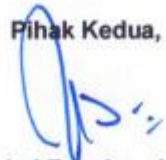
1. Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK
2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp34.097.168.000,-

Jakarta, 30 November 2021

Pihak Kedua,



Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,



Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001

**TARGET TRIWULAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	B03 (5)	B06 (6)	B09 (7)	B12 (8)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Lulusan diklat aparatur LHK	2.958 orang*	30 orang	30 orang	1.558 orang	2.958 orang
2.		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.744 orang*	720 orang	810 orang	2.744 orang	2.744 orang
3.		Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.388 orang*	120 orang	540 orang	1.338 orang	1.388 orang
4.		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	35 orang	8 orang	15 orang	20 orang	35 orang
5.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola	67 poin (7 unit*)	-	-	-	67 poin (7 unit)
6.	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	478 orang**	-	478 orang	478 orang	478 orang

Catatan:

* Total target termasuk yang dilaksanakan pada Balai Diklat LHK;

** Total target termasuk yang dilaksanakan pada SMKKN

B03 : Target Kumulatif Triwulan I; B06 : Target Kumulatif Triwulan II; B09 : Target Kumulatif Triwulan III; B12 : Target Kumulatif Triwulan IV

Jakarta, 30 November 2021

**Ir. Mariana Lubis, M.M.
NIP. 19621112 199101 2 001**

